**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Mugni Baharuddin1, dan Marjoni Rachman2**

**1Administrasi Negara, Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia**

**2Dosen Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 75124, Indonesia**

**E-Mail:** **Muhammadridha@untag-smd.ac.id**

**ABTRAK**

 Berdasarkan hasil perhitungan Korelasi Product Moment antara variabel implementasi prinsip-prinsip good governance dengan variabel kinerja pegawai pada Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, menyatakan bahwa hipotesis yang telah diajukan dapat diterima, dengan nilai yang diperoleh 0,562. Nilai 0,562 kemudian dikonsultasikan pada tabel Interpretasi Korelasi Product Moment, dengan hasil interpretasi sedang karena 0,562 berada pada interval 0,40-0,599. Sehingga dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara implementasi prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja pegawai pada Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

 Kemudian berdasarkan perhitungan uji-t di dapat hasil 3,325 ini berarti dapat dikatakan bahwa = 3,325 hasil ini jika dibandingkan dengan nilai pada tabel harga-harga t-kritis student ternyata lebih besar, yaitu =3,325>1,705 pada tingkat signifikan 0,05 untuk n -2 = 26 (26-2=4). Ini berarti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel implementasi prinsip-prinsip good governance dengan variabel kinerja pegawai. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa rumusan masalah di dalam penelitian ini telah terjawab dan hipotesis yang diajukan dapat terbukti kebenarannya.

**Kata Kunci : Implementasi Prinsip-Prinsip Good Govrnance, Kinerja Pegawai**

**I. PENDAHULUAN**

 Perkembangan administrasi publik merupakan hal mendasar, karana harus sesuai arahan perkembangan lingkungan global semakin kompetitif dalam seluruh aspek, termasuk dalam tata kelola kepemerintahan. Peran administrasi publik harus sesuai dengan tuntutan zaman, tuntutan masyarakat, tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi apabila organisasi ingin terus eksis. Reformasi di berbagai bidang diarahkan pada terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang antisifatif (beriontasi ke depan), inovatif (perubahan dan pembaharuaan), berkualitas unggul dalam berkompetisi untuk dapat memberikan pelayanan prima. Reformasi birokrasai diharapkan dapat mewujudkan keberhasilan melalui penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan SDM aparatur, akuntabilitas (pertanggungjawaban), dan lainnya.

 Semangat reformasi telah mewarnai pendayaguna aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dengan membangun, mewujudkan/menerapkan good governance, bukan hanya berupa masalah perbaikan kondisi dan komitmen birokrasi dan administrasi publik saja, tetapi juga perbaikan kondisi dan komitmen dunia usaha dan masyarakat yang memiliki bermacam kelompok sosial dengan kondisi dan kepentingan yang berbeda. Ketiga unsur tersebut, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus bersama-sama/mengadakan hubungan kemitraan berupaya mewujudkan terlaksananya good governance. Prioritas,pembangunan/pengembangan sumberdaya aparatur diarahkan pada penciptaan good governance dengan kebijakan yang mengarah kepada penerapan prinsip-prinsip good governance.

 Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan) sedangkan praktek terbaiknya adalah “good governance” (kepemerintahan yang baik) agar good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutukan komitmen dari semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat. Good governance yang efektif menurut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional dan etos kerjadan moral yang tinggi dengan demikian penerapan good governance dalam peyelenggaraan pemerintahan negara merupakan tantangan tersendiri.

 Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam menacai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan penembangan dan penerapan sistem penanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahandapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna bertanggung jawab serta bebas KKN.

 Hari ini konsep good governance untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dilator belakangi oleh banyak faktor. Namun demikian salah satu fakror yang terbesar adalah ketidakberdayaan pemerintah negara-negara berkembang dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan hiperkompetisi. Pemerintah tidak lagi menjadi pemain tetapi mengharap peran lebih besar dari sektor swasta dan masyarakat sipil (rakyat).

 Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu mitra pemerintah sebagai mitra pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan pemerintah provinsi merupakan unsur pelaksanaan asas desentralisasi. Maka dalam rangka menciptakan good governance. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur sangat berperan penting, dengan pengertian lain Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur harus menjadi suatu organisasi yang mempunyai kenerja yang baik agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Mengingat bahwa kinerja pegawai dari suatu organisasi itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka informasi tentang kinerja pegawai merupakan satu hal yang sangat penting.

 Dalam mencapai tujuan tersebut di era globalisasi perlu didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni yaitu pegawai yang memiliki sifat dan sikap membangun dan mempunyai daya tanggap, inisiatif serta daya adaptasi yang tinggi, seiring hal tersebut sebagai unsur aparatur pemerintah, pegawai sebagai abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemikir, perencana, penggerak partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, menjaga persatuan

dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada pancasila dan Undang-undang dasar 1945 serta sekaligus berperan sebagai pengendali dan pengawas pelaksanaan pembangunan itu sendiri Pada dasarnaya kinerja menekan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa saja yang keluar (out-come). Bila dilakukan lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atau jabatan adalah suatu proses yang mengolah in-put menjadi out-put (hasil Kerja).penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kinerja individu, bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan/tindakan dengan landasan standar yang jelas dan tertulis. Mengingat kinerja mengandung komponen kompetensi dan produktifitas hasil, maka hasil kinerja sangat tergantung pata tingkat kemampuan individu dalam pencapaiannya, terutama tujuan organisasi.

**II. PERMASALAHAN**

*“Bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance pada Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur ?”*

**III. METODE PENELITIAN**

 Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian bersifat asosiatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh sebab akibat dari kedua variabel yang diteliti yaitu prinsip-prinsip good governance sebagai variabel bebas dan kinerja pegawai sebagai variabel terikat.

 Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Yaitu analisis data dilakukan untuk menguji dan untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan kausal antara variabel (X) implementasi prinsip-prinsip good governance dengan variabel (Y) kinerja pegawai. Untuk kepentingan data ini maka penulis menggunakan alat analisis koefisien korelasi product momen (Pearson). Seperti telah dikemukakan pada bab terdahulu rumusan koefisien korelasi product momen adalah sebagai berikut.

Rumus =

Keterangan :

*Rxy* = Angka indeks korelasi”r” *product moment*

*N* = Jumlah subjek

*∑xy* = Jumlah hasil penelitian antara skor x dan y

*∑x* = Jumlah hasil skor x

*∑y* = Jumlah skor y

 Analisis dilakukan dengan menggunakan program piranti lunak *Statistic Product and Service Solution* (SPSS) 21 For Windows.Hasil analisis korelasi tersebut di atas di sajikan pada table berikut.

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

 Peneliti melaksanakan penelitian di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur terletak di Jl. Jendral Soedirman No.22 Bugis, Samarinda Kota. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana teknis Pemprov, dan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh Drs. Syafruddin Pernyata, M.Hum selaku Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur No.72 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**4.2 HASIL PENELITIAN**

**4.2.1 Good Governance**

 Untuk mengetahui sejauh mana implementasi prinsip-prinsip good governance berkorelasi terhadap Pelayanan Publik, penulis mengajukan 4 (empat) indikator, yaitu :

A. Akuntabilitas

B. Transparansi

C. Partisipasi

D. Supremasi Hukum

**A. Akuntabilitas**

 Akuntabilitas, kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memberikan hak pertanggungjawaban.

 Data yang berhasil dihimpun berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan kepada responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.1 Jawaban Responden Tentang Akuntabilitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No Soal | Pernyataan | Frekuensi(F) | Persentase(%) |
| 1 | Sangat Setuju (5) | 21 | 80.8% |
| Setuju (4) | 5 | 19.2% |
| Kurang Setuju (3) | - | - |
| Tidak Setuju (2) | - | - |
| Sangat Tidak Setuju (1) | - | - |
| Jumlah | 26 | 100% |

***Sumber Data : Hasil Penelitian***

Berdasarkan data di atas nampak jelas terlihat bahwa untuk pernyataan nomor 1, yaitu pelaksanaan kebijakan dipertanggung jawabkan kepada pemerintahan, responden menjawab sangat setuju sebanyak 21 orang responden atau sebesar 80.8%, menjawab setuju sebanyak 5 orang responden atau sebesar 19.2%

**Tabel 4.2 Jawaban Responden Tentang Akuntabilitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No Soal | Pernyataan | Frekuensi(F) | Persentase(%) |
| 2 | Sangat Setuju (5) | 22 | 84.6% |
| Setuju (4) | 4 | 15.4% |
| Kurang Setuju (3) | \_ | \_ |
| Tidak Setuju (2) | \_ | \_ |
| Sangat Tidak Setuju (1) | \_ | \_ |
| Jumlah | 26 | 100% |

***Sumber Data : Hasil Penelitian***

 Berdasarkan data di atas nampak jelas terlihat bahwa untuk pernyataan nomor 2, yaitu program benar-benar bermanfaat bagi kepentingan publik respondenMenjawab, sangat setuju sebanyak 22 orang responden atau sebesar 84%, menjawab setuju sebanyak 4 orang responden atau sebesar 15.4%.

**Tabel 4.3 Jawaban Responden Tentang Akuntabilitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No Soal | Pernyataan | Frekuensi(F) | Persentase(%) |
| 3 | Sangat Setuju (5) | 6 | 23.1% |
| Setuju (4) | 19 | 73.1% |
| Kurang Setuju (3) | 1 | 3.8% |
| Tidak Setuju (2) | - | - |
| Sangat Tidak Setuju (1) | - | - |
| Jumlah | 26 | 100% |

***Sumber Data : Hasil Penelitian***

Berdasarkan data di atas nampak jelas terlihat bahwa untuk pernyataan nomor 3, yaitu setiap kebijakan yang di ambil sesuai dengan visi & misi responden menjawab, sangat setuju sebanyak 6 orang responden atau sebesar 23.1%, menjawab setuju sebanyak 19 orang responden atau sebesar 73.1%, menjawab kurang setuju 1 orang responden atau sebesar 3.8%.

**B. Trasparansi**

Transparasi pemerintahan harus dibangun dalam kebebasan aliran informasi yang ingin dimiliki oleh mereka yang membutuhkan.

Data yang berhasil dihimpun berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan kepada responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.4 Jawaban Responden Tentang Trasparansi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No Soal | Pernyataan | Frekuensi(F) | Persentase(%) |
| 4 | Sangat Setuju (5) | 5 | 19.2% |
| Setuju (4) | 21 | 80.8% |
| Kurang Setuju (3) | \_ | \_ |
| Tidak Setuju (2) | \_ | \_ |
| Sangat Tidak Setuju (1) | \_ | \_ |
| Jumlah | 26 | 100% |

***Sumber Data : Hasil Penelitian***

Berdasarkan data di atas nampak jelas terlihat bahwa untuk pernyataan nomor 4, yaitu penggunaan website resmi pemerintahan sebagai sarana publikasi dokumen ke public responden menjawab, sangat setuju sebanyak 5 orang responden atau sebesar 19.2%, setuju sebanyak 21 orang reponden atau sebesar 80.8.4%.

**Tabel 4.5 Jawaban Responden Tentang Trasparansi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No Soal | Pernyataan | Frekuensi(F) | Persentase(%) |
| 5 | Sangat Setuju (5) | 5 | 19.2% |
| Setuju (4) | 21 | 80.8% |
| Kurang Setuju (3) | \_ | \_ |
| Tidak Setuju (2) | \_ | \_ |
| Sangat Tidak Setuju (1) | \_ | \_ |
| Jumlah | 26 | 100% |

***Sumber Data : Hasil Penelitian***

Berdasarkan data di atas nampak jelas terlihat bahwa untuk pernyataan nomor 5, yaitu informasi yang disajikan sesuai dengan fakta responden menjawab, sangat setuju sebanyak 5 orang responden atau sebesar 19.2%, setuju sebanyak 21 orang responden atau sebesar 80.8%.

**Tabel 4.6 Jawaban Responden Tentang Trasparansi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No Soal | Pernyataan | Frekuensi(F) | Persentase(%) |
| 6 | Sangat Setuju (5) | 20 | 76.9% |
| Setuju (4) | 6 | 23.1% |
| Kurang Setuju (3) | \_ | \_ |
| Tidak Setuju (2) | \_ | \_ |
| Sangat Tidak Setuju (1) | \_ | \_ |
| Jumlah | 26 | 100% |

***Sumber Data : Hasil Penelitian***

Berdasarkan data di atas nampak jelas terlihat bahwa untuk pernyataan nomor 6, yaitu bertambahnya wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahanresponden menjawab, sangat setuju sebanyak 20 orang responden atau sebesar 76.9%, setuju sebanyak 6 orang responden atau sebesar 23%.

**C. Partisipasi**

Partisipasi melibatkan masyarakat terutama aspirasinya dalam pengambilan kebijakan atau fomulasi rencana dibuat pemerintah, juga dilihat pada ketertiban masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah.

Data yang berhasil dihimpun berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan kepada responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.7 Jawaban Responden Tentang Partisipasi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No Soal | Pernyataan | Frekuensi(F) | Persentase(%) |
| 7 | Sangat Setuju (5) | 13 | 50.0% |
| Setuju (4) | 13 | 50.0% |
| Kurang Setuju (3) | \_ | \_ |
| Tidak Setuju (2) | \_ | \_ |
| Sangat Tidak Setuju (1) | \_ | \_ |
| Jumlah | 26 | 100% |

***Sumber Data : Hasil Penelitian***

Berdasarkan data di atas nampak jelas terlihat bahwa untuk pernyataan nomor 7, yaitu ikut turut serta dalam mensukseskan program yang ada responden menjawab sangat setuju sebanyak 13 orang atau sebesar 50.0%, setuju sebanyak 13 orang atau sebesar 50.0%.

**Tabel 4.8 Jawaban Responden Tentang Partisipasi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No Soal | Pernyataan | Frekuensi(F) | Persentase(%) |
| 8 | Sangat Setuju (5) | 14 | 53.8% |
| Setuju (4) | 12 | 46.2% |
| Kurang Setuju (3) | \_ | \_ |
| Tidak Setuju (2) | \_ | \_ |
| Sangat Tidak Setuju (1) | \_ | \_ |
| Jumlah | 26 | 100% |

***Sumber Data : Hasil Penelitian***

Berdasarkan data di atas nampak jelas terlihat bahwa untuk pernyataan nomor 8, yaitu melibatkan masyarakat dalam menetukan sasaran kerja responden menjawab sangat setuju sebanyak 14 orang responden atau sebesar 53.8%, setuju sebanyak 12 orang atau sebesar 46.2%.

**D. Supremasi Hukum**

Supremasi hukum setiap tindakan negara harus dilandasi hukum dan bukan didasarkan pada tindakan sepihak dengan kekuasaan yang dimiliki.

Data yang berhasil dihimpun berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan kepada responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.9 Jawaban Responden Tentang Supremasi Hukum**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No Soal | Pernyataan | Frekuensi(F) | Persentase(%) |
| 9 | Sangat Setuju (5) | 21 | 80.8% |
| Setuju (4) | 5 | 19.2% |
| Kurang Setuju (3) | \_ | \_ |
| Tidak Setuju (2) | \_ | \_ |
| Sangat Tidak Setuju (1) | \_ | \_ |
| Jumlah | 26 | 100% |

***Sumber Data : Hasil Penelitian***

Berdasarkan data di atas nampak jelas terlihat bahwa untuk pernyataan nomor 9,yaitu menindak tegas pegawai yang melakukan pelanggaran disiplinresponden menjawab, sangat setuju sebanyak 5 orang responden atau sebesar 19.2%, setuju sebanyak 21 orang responden atau sebesar 80.8%.

**Tabel 4.10 Jawaban Responden Tentang Supremasi hukum**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No Soal | Pernyataan | Frekuensi(F) | Persentase(%) |
| 10 | Sangat Setuju (5) | 5 | 19.2% |
| Setuju (4) | 21 | 80.8% |
| Kurang Setuju (3) | \_ | \_ |
| Tidak Setuju (2) | \_ | \_ |
| Sangat Tidak Setuju (1) | \_ | \_ |

***Sumber Data : Hasil Penelitian***

Berdasarkan data di atas nampak jelas terlihat bahwa untuk pernyataan nomor 10, yaitu menindak tegas pegawai yang menyalahgunakan wewenang responden menjawab sangat setuju sebanyak 5 orang responden atau sebesar 19.2%, setuju sebanyak 21 orang responden atau sebesar 80.8.

**4.2.2 Kinerja Pegawai**

Sebagaimana yang telah para ahli kemukakan pada bab terdahulu bahwa Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance akan mempengaruhi kinerja pegawai yang baik terhadap masyarakat. Untuk variabel kinerja pegawai, penulis menggunakan 5 indikator, yaitu:

a. Kualitas Kerja

b. Kuantitas Kerja

c. Disiplin Dalam Bekerja

d. Inisiatif

e. Tanggungjawab

 Berikut ini penulis akan kemukakan data yang berhasil di himpun di lapangan dari masing-masing indikator di atas.

**A. Kualitas Kerja**

 Kualitas kerja yaitu mutu hasil kerja yang didasarkan pada standar yang ditetapkan, biasanya diukur melalui ketepatan, ketelitian, keterampilan, dan keberhasilan kerja.

 Data yang berhasil di himpun berdasarkan kuesioner yang telah di bagikan kepada responden dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

**Tabel 4.11 Jawaban Responden Tentang Kualitas Kerja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No Soal | Pernyataan | Frekuensi(F) | Persentase(%) |
| 11 | Sangat Setuju (5) | 22 | 84.6% |
| Setuju (4) | 4 | 15.4% |
| Kurang Setuju (3) | \_ | \_ |
| Tidak Setuju (2) | \_ | \_ |
| Sangat Tidak Setuju (1) | \_ | \_ |
| Jumlah | 26 | 100% |

***Sumber Data : Hasil Penelitian***

Berdasarkan data di atas nampak jelas terlihat bahwa untuk pernyataan nomor 11, yaitu anda telah menunjukkan perhatian pada aspek detail, kecermatan dan ketelitian dalam bekerja responden menjawab, sangat setuju sebanyak 4 orang responden atau sebesar 15.4%, setuju sebanyak 22 orang responden atau sebesar 84.6%.

**Tabel 4.12 Jawaban Responden Tentang Kualitas Kerja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No Soal | Pernyataan | Frekuensi(F) | Persentase(%) |
| 12 | Sangat Setuju (5) | 3 | 11.5% |
| Setuju (4) | 22 | 84.6% |
| Kurang Setuju (3) | 1 | 3.8% |
| Tidak Setuju (2) | \_ | \_ |
| Sangat Tidak Setuju (1) |  | % |
| Jumlah  | 26 | 100% |

***Sumber Data : Hasil Penelitian***

Berdasarkan data di atas nampak jelas terlihat bahwa untuk pernyataan nomor 12, yaitu pekerjaan anda saat ini sudah sesuai dengan keterampilan yang anda miliki responden menjawab, sangat setuju sebanyak 3 orang responden atau sebesar 11.5%, setuju sebanyak 22 orang responden atau sebesar 84.6%, kurang setuju sebanyak 1 orang responden atau sebesar 3.8%.

**B. Kuantitas Kerja**

 Kuantitas kerjayaitu kemampuan pegawai melakukan banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu kerja yang ada.

Data yang berhasil di himpun berdasarkan kuesioner yang telah di bagikan kepada responden dapat dilihat dari tabel di bawah ini

**Tabel 4.13 Jawaban Responden Tentang Kuantitas Kerja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No Soal | Pernyataan | Frekuensi(F) | Persentase(%) |
| 13 | Sangat Setuju (5) | 5 | 19.2% |
| Setuju (4) | 21 | 80.8% |
| Kurang Setuju (3) | \_ | \_ |
| Tidak Setuju (2) | \_ | \_ |
| Sangat Tidak Setuju (1) | \_ | \_ |
| Jumlah | 26 | 100% |

***Sumber Data : Hasil Penelitian***

Berdasarkan data di atas nampak jelas terlihat bahwa untuk pernyataan nomor 13, yaituanda mampu menggunakan waktu dengan efisien dalam melaksanakan segala tugas yang dibebankan kepada anda responden menjawab, sangat setuju sebanyak 5 orang responden atau sebesar 19.2%, setuju sebanyak 21 orang responden atau sebesar 80.8%.

**Tabel 4.14 Jawaban Responden Tentang Kuantitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No Soal | Pernyataan | Frekuensi(F) | Persentase(%) |
| 14 | Sangat Setuju (5) | 4 | 15.4% |
| Setuju (4) | 21 | 80.8% |
| Kurang Setuju (3) | 1 | 3.8% |
| Tidak Setuju (2) | \_ | \_ |
| Sangat Tidak Setuju (1) | \_ | \_ |
| Jumlah | 26 | 100% |

***Sumber Data : Hasil Penelitian***

Berdasarkan data di atas nampak jelas terlihat bahwa untuk pernyataan nomor 14, yaituanda mampu menyelesaikan tugas kerja yang diberikan secara konsisten responden menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang responden atau sebesar 15.4%, setuju sebanyak 21 orang responden atau sebesar 80.8%, kurang setuju sebanyak 1 orang responden atau sebesar 3.8%.

**C. Disiplin Dalam Bekerja**

 Disiplin dalam bekerja, pegawai harus disiplin pada dirinya, tugasnya, serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.

Data yang berhasil di himpun berdasarkan kuesioner yang telah di bagikan kepada responden dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 4.15 Jawaban Responden Tentang Disiplin Dalam Bekerja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No Soal | Pernyataan | Frekuensi(F) | Persentase(%) |
| 15 | Sangat Setuju (5) | 4 | 15.4% |
| Setuju (4) | 19 | 73.1% |
| Kurang Setuju (3) | 3 | 11.5% |
| Tidak Setuju (2) | \_ | \_ |
| Sangat Tidak Setuju (1) | \_ | \_ |
| Jumlah | 26 | 100% |

***Sumber Data : Hasil Penelitian***

Berdasarkan data di atas nampak jelas terlihat bahwa untuk pernyataan nomor 15, yaitu anda mengetahui sepunuhnya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahan responden menjawab, sangat setuju sebanyak 4 orang responden atau sebesar 15.4%, setuju sebanyak 19 orang responden atau sebesar 73%, kurang setuju sebanyak 3 orang responden atau sebesar 11.5%.

**Tabel 4.16 Jawaban Responden Tentang Disiplin Dalam Bekerja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No Soal | Pernyataan | Frekuensi(F) | Persentase(%) |
| 16 | Sangat Setuju (5) | 11 | 42.3% |
| Setuju (4) | 14 | 53.8% |
| Kurang Setuju (3) | 1 | 3.8% |
| Tidak Setuju (2) | \_ | \_ |
| Sangat Tidak Setuju (1) | \_ | \_ |
| Jumlah | 26 | 100% |

***Sumber Data : Hasil Penelitian***

Berdasarkan data di atas nampak jelas terlihat bahwa untuk pernyataan nomor 17, yaitu anda bersedia dikenakan sanksi apabila melanggar peraturan responden menjawab,sangat setuju sebanyak 11 orang responden atau sebesar 42.3%, setuju sebanyak 14 orang responden atau sebesar 53.8%, kurang setuju sebanyak 1 orang responden atau sebesar 3.8%.

**D. Inisiatif**

 Kemampuan mengenali masalah-masalah dan mengambil tindakan korektif, memberikan saran-saran untuk peningkatan dan menerima tanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang belum diberikan.

Data yang berhasil di himpun berdasarkan kuesioner yang telah di bagikan kepada responden dapat dilihat dari tabel di bawah ini

**Tabel 4.17 Jawaban Responden Tentang Inisiatif**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No Soal | Pernyataan | Frekuensi(F) | Persentase(%) |
| 17 | Sangat Setuju (5) | 4 | 15.4% |
| Setuju (4) | 22 | 84.5% |
| Kurang Setuju (3) | \_ | \_ |
| Tidak Setuju (2) | \_ | \_ |
| Sangat Tidak Setuju (1) | \_ | \_ |
| Jumlah | 26 | 100% |

***Sumber Data : Hasil Penelitian***

Berdasarkan data di atas nampak jelas terlihat bahwa untuk pernyataan nomor 17, yaitu anda senantiasa berinisiatif untuk mengatasi setiap permasalahan dalam pelaksanaan tugas responden menjawab, sangat setuju sebanyak 4 orang responden atau sebesar 15.4%, setuju sebanyak 22 orang responden atau sebesar 84.6%.

**Tabel 4.18 Jawaban Responden Tentang Inisiatif**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No Soal | Pernyataan | Frekuensi(F) | Persentase(%) |
| 18 | Sangat Setuju (5) | 3 | 11.5% |
| Setuju (4) | 23 | 88.5% |
| Kurang Setuju (3) | \_ | \_ |
| Tidak Setuju (2) | \_ | \_ |
| Sangat Tidak Setuju (1) | \_ | \_ |
| Jumlah | 26 | 100% |

***Sumber Data : Hasil Penelitian***

Berdasarkan data di atas nampak jelas terlihat bahwa untuk pernyataan nomor 18, yaitu anda bekerja sesuai dengan pedoman dan prosedur kerja pegawai responden menjawab, sangat setuju sebanyak 3 orang responden atau sebesar 11.5%, setuju sebanyak 23 orang responden atau sebesar 88.5%.

**E. Tanggung Jawab**

kesediaan karyawan dalam mempertanggung jawabkan kebijaksanaan, pekerjaannya, sarana dan prasarana yang digunakannya serta perilaku kerjanya.

 Data yang berhasil di himpun berdasarkan kuesioner yang telah di bagikan kepada responden dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 4.19 Jawaban Responden Tentang Tanggung Jawab**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No Soal | Pernyataan | Frekuensi(F) | Persentase(%) |
| 19 | Sangat Setuju (5) | 7 | 26.9% |
| Setuju (4) | 18 | 69.2% |
| Kurang Setuju (3) | 1 | 3.8% |
| Tidak Setuju (2) | \_ | \_ |
| Sangat Tidak Setuju (1) | \_ | \_ |
| Jumlah | 26 | 100% |

***Sumber Data : Hasil Penelitian***

Berdasarkan data di atas nampak jelas terlihat bahwa untuk pernyataan nomor 19, yaitu anda merasa bertanggungjawab atas peralatan (fasilitas) yang telah digunakan responden menjawab, sangat setuju sebanyak 7 orang responden atau sebesar 26.9%, setuju sebanyak 18 orang responden atau sebesar 69.2%, kurang setuju sebanyak 1orang responden atau sebesar 3.8%

**Tabel 4.20Jawaban Responden Tanggung Jawab**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No Soal | Pernyataan | Frekuensi(F) | Persentase(%) |
| 20 | Sangat Setuju (5) | 6 | 23.1% |
| Setuju (4) | 19 | 73.1% |
| Kurang Setuju (3) | 1 | 3.8% |
| Tidak Setuju (2) | \_ | \_ |
| Sangat Tidak Setuju (1) | \_ | \_ |
| Jumlah | 26 | 100% |

***Sumber Data : Hasil Penelitian***

Berdasarkan data di atas nampak jelas terlihat bahwa untuk pernyataan nomor 20, yaitu anda bersedia menyelesaikan masalah pekerjaan tanpa diperintah responden menjawab, sangat setuju sebanyak 6 orang responden atau sebesar 23.1%, setuju sebanyak 19 orang responden atau sebesar 73.1%, kurang setuju sebanyak 4 orang responden atau sebesar 12.1%, tidak setuju sebanyak 1 orang responden atau sebesar 3.8%.

**4.3. Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**4.3.1. Analisa Hasil Penelitian**

 Analisa data dilakukan dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah di dalam penelitian ini serta menguji dan membuktikan hipotesis yang dirumuskan di dalam penelitian ini. Dengan kata lain analisis data dilakukan untuk menguji dan untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan kausal antara variabel (X) implementasi prinsip-prinsip good governance dengan variabel (Y) kinerja pegawai. Untuk kepentingan data ini maka penulis menggunakan alat analisis koefisien korelasi product momen (Pearson). Seperti telah dikemukakan pada bab terdahulu rumusan koefisien korelasi product momen adalah sebagai berikut.

Keterangan :

*Rxy* = Angka indeks korelasi”r” *product moment*

*N* = Jumlah subjek

*∑xy* = Jumlah hasil penelitian antara skor x dan y

*∑x* = Jumlah hasil skor x

*∑y* = Jumlah skor y

 Analisis dilakukan dengan menggunakan program piranti lunak *Statistic Product and Service Solution* (SPSS) 21 For Windows.Hasil analisis korelasi tersebut di atas di sajikan pada table berikut.

**Table 4.21. Hasil Analisis Korelasi Produck Moment (Pearson)**

|  |
| --- |
| **Correlations** |
|  | Goodgovernace | KinerjaPegawai |
| Goodgovernace | Pearson Correlation | 1 | .562\*\* |
| Sig. (2-tailed) |  | .003 |
| N | 26 | 26 |
| Kinerja Pegawai | Pearson Correlation | .562\*\* | 1 |
| Sig. (2-tailed) | .000 |  |
| N | 26 | 26 |
| \*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). |

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, maka diperoleh =0,562 ini berarti bahwa hasil tersebut termasuk lebih besar jika dibandingkan dengan tabel harga-harga kritis dari Koefisien Korelasi Product Moment (Pearson) untuk n = 26 pada tingkat signifikan 5% yaitu 0,388atau dikatakan pula bahwa =0,562 > 0,388. Ini berarti bahwa ada tingkat hubungan yang positif dan signifikan dari variabel Implementasi prinsip-prinsip good governance dengan variabel kinerja pegawai.

Sementara itu jika hasil tersebut di

bandingkan dengan tabel pendoman untuk emberikan interpretasi terhadap Koefisien Korelasi Product Moment sebagaiman dimuat pada Bab III, maka hasil perhitungan tersebut berada pada interval 0,40-0,599 yang berarti terdapat hubungan yang sedang antara variabel implementasi prinsip- prinsip good governance dengan variabel kinerja pegawai.

**4.3.2 Uji Hipotesis**

Sementara itu untuk mengetahui besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya dan menguju hipotesis yang dirumuskan di dalam penelitian ini, maka digunakan alat penguju *t-student* atau yang sering pula disebut dengan *uji-t* yang rumusnya adalah sebagai berikut :

 Dimana :

t = Uji-t

r = Koefisien Korelasi

n = Jumlah Pengamatan ( Sampel)

 Perhitungan untuk uji-t ini pun dilakukan dengan program SPSS 21.0 for windows, yaitu dengan menggunakan formulasi dari regresi linear sederhana yang hasil perhitungan di sajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.22. Analisis Regresi Linear Sederhana**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 9.957 | 9.544 |  | 1.043 | .307 |
| Goodgovernace | 744 | .224 | .562 | 3.325 | .003 |
| a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai |

Dari hasil perhitungan yang disajikan di dalam tabel tersebut di atas terlihat dari hasil uji-t adalah 3.325, ini berarti dapat dikatakan bahwa = 3.325 hasil ini jika dibandingkan dengan nilai pada tabel harga-harga t-kritis student ternyata lebih besar, yaitu =3,325>1,705 pada tingkat signifikan 0,05 untuk n -2 = 26 (26-2=24). Ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel implementasi prinsip-prinsip good governance dengan variabel kinerja Pegawai .Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa rumusan masalah di dalam penelitian ini telah terjawab dan hipotesis yang diajukan dapat terbukti kebenaranya.

**4.3.3 Pembahasan**

 Setelah analisa data dilakukan maka selanjutnya adalah melakukan pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan Korelasi Product Moment antara variabel implementasi prinsip-prinsip good governance dengan variabel kinerja pegawai pada Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, menyatakan bahwa hipotesis yang telah diajukan dapat diterima, dengan nilai yang diperoleh 0,562. Nilai 0,562 kemudian dikonsultasikan pada tabel Interpretasi Korelasi Product Moment, dengan hasil interpretasi kuat karena 0,562 berada pada interval 0,40-0,599.

**5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Implementasi prinsip-prinsip good governance yang sedang berjalan di Kantor Dinas PariwisataProvinsi Kalimantan Timur dikategorikan sedang. Ini dikaranakan partisipasi masyarakat dalam membuat suatu kebijakan, program kerja, seharusnya Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur harus mengikut sertakan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan karana dari masyrakatlah dinas dapat mengetahui apa saja yang dikehendaki, dan juga kurangnya supremasi hukum dalam Dinas Pariwisata provinsi Kalimantan Timur tetapi dalam hal sistem trasparansi, menerima masukan-masukan dan saran, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan timur tergolang baik.

2. Kinerja pegawai pada Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dikategorikan sedang. Ini dikarenakan kinerja pegawai Kantor dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan timur dirasa masih kurang baik dan , ternyata masih cukup banyak kenyataan yang kurang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yaitu masih rendahnya etos kerja pegawai. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pegawai yang tidak tepat waktu saat masuk kantor, menunda pelaksanaan tugas kantor, bermain sosial media pada saat jam kerja dan keluar kantor tanpa keterangan pada saat jam kerja, serta pulang lebih awal sebelum jam pulang kantor.

3. Berdasarkan analisa data hasil penelitian pada bab IV maka dapar disimpulkan bahwa :

a. Bahwa terdapat hubungan yang antara variabel implementasi prinsip-prinsip good governance dengan variabel kinerja pegawai pada Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

b. Kemudian dari hasil perhitungan uji-t jika dibandingkan dengan nilai pada tabel harga-harga t-kritis student ternyata lebih besar. Ini berarti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel implementasi prinsip-prinsip good governance dengan variabel kinerja pegawai .Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rumusan masalah di dalam penelitian ini telah terjawab dan hipotesis yang penulis ajukan dapat terbukti kebenarannya.

**5.2. SARAN**

Dari kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimanta Timur harus selalu memperbaiki hubungan dengan sektor swasta/dunia usaha dan masyarakat, karena pada dasarnya tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan *stakeholder,* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: akuntabilitas, trasparansi, partisipasi, dan supremasi hukum.

2. Untuk lebih meningkatkan mutu pegawai Dinas Pariwisata provinsi Kalimantan Timur maka harus melakukan starategi pengembangan baik itu dengan pendidikan atau pelatihan dan lain-lainya. Sehingga para pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dapat memiliki muu dalam bekerja dan masyarakat puas terhadap kinerja para pegawai.

3. Kepada para peneliti yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini didasarkan agar lebih memperdalam unit analisisnya, baik variabel maupun indikator penelitian, sehingga dapat lebih mempertajam hasil yang sudah penulis peroleh di dalam penelitian ini.

**BIBLIOGRAFI**

A.Black, James dan Dean Jean J. Champion. 2001, *MetodedanMasalahPenelitianSosial.*Bandung: ReefikaAditama.

Anwar PrabuMangkunegara. (2010). *EvaluasiKinerja SDM*. Bandung: PT RefikaAditama

Anwar PrabuMangkunegara. (2004). *ManajemenSumberdayamanusia Perusahaan*. Bandung: PT RemajaRosdakarya.

Bahri. 2008*. Konsep Dan DefinisiKonseptual*. PT. Raja GrapindoPersada: Jakarta.

Dantes, Nyoman. 2012. *MetodePenelitian*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.

Suyanto, 2005.*MetodePenelitianSosial.*Jakarta: Kencana.

Noor, Juliansyah. 2011*. MetodologiPenelitian*. Jakarta: KencanaPrenada Group

Usman, Nurdin. 2002. *KonteksImlpementasiBerbasisKurikulum*. Jakarta.

Harsono.Hanifah. 2002. *ImplementaiKebijakan Dan Politik*. Jakarta.

Setiawan, Guntur, 2004. *ImplementasiDalamBirokrasi Pembangunan*. Bandung.

Rewansyah, Asmawi. 2010. *ReformasiBirokrasiDalamRangkaGood Governance*.RizkyGrafis: Jakarta.

Nanang, Martono. 2010. *MetodePenelitianKuantitatif: AnalisaisidanAnalisis*

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.

Malayu S.P Hasibuan. (2010). *ManajemenSumberDayaManusia*. Jakarta: PT. BumiAksara.

Sudjana.2000. *StatistikaEkonomidanNiaga*.Bandung :Tarsito

Sedarmayanti 2003.*Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam*

 *RangkaOtonomi Daerah*. MandarMaju: Bandung.

Sedarmayanti. 2009. *ReformasiAdministrasiPublik, ReformasiBirokrasi, dan*

 *MasaDepan (MewujudkanPelayanan Prima danKepemerintahan yang Baik).*Bandung: RefikaAditama.

Sunarso. 2013. *PerbandinganSistemPemerintahan*. PenerbitOmbak: Yogyakarta.

Sugiyono. 2012. *MetodePenelitiaanBisnis*. Bandung :Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *MetodePenelitianAdministrasi*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2010. *MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatifdan R&D*. Alfabeta:

 Bandung.

Sinambela, Lijan P. 2006. *ReformasiPelayananPublik*. Jakarta: BumiAksara.

Umar, Husein. 2004. *MetodeRisetIlmuAdministrasi*. Jakarta: GramediaPustaka Utama.